

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (www.bpkp.go.id). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 mendapat kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang menjadi kekayaan milik desa. Menurut Mardiasmo (2002), dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya masih banyak di dalam laporan keuangan data-data yang disajikan tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder*. *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Menurut Halim (2007) menyebutkan tujuan pelaporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi kebutuhan *stakeholder*. Lebih jelasnya tujuan pelaporan keuangan, antara lain : mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD, menyediakan informasi tentang sumber daya keuangan dan penggunaannya, menyediakan informasi tentang cara pemerintah daerah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitas kasnya, serta menyediakan informasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah, terutama mengenai efisiensi biaya operasi dan pencapaian target.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta memperbaiki hasil evaluasi mereka di masa depan.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Suwardjono, 2005). Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi keterandalan. Padahal saat sekarang ini pemerintah menginginkan agar laporan keuangan disajikan secara andal. Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan, artinya menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi kebenarannya. Keterandalan merupakan unsur paling penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal. Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik dan benar. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kualitas sumber daya manusia melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Karmila, Tanjung dan Darlis, 2014). Kualitas sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kualitas sumber

daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. PP No. 56 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan mempublikasi informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dengan optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya akan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga akan terjadi peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Marlinawati dalam Primayana, 2014: 10).

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Penyusunan laporan keuangan terkadang terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat pemerintah, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. Pengendalian internal menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi BPK yang menemukan bahwa banyaknya kasus kelemahan sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain itu diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Apabila informasi keuangan tersebut tidak disajikan secara andal, akan menyebabkan informasi kehilangan nilai untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil *stakeholder*.

Fenomena pertama yang terdapat di beberapa desa di Kecamatan Tanggul yaitu desa Darungan, Klatakan, Kramat Sukoharjo, Manggisian, Patemon, Selodakon, Tanggul Kulon, dan Tanggul Wetan adalah masih adanya beberapa sumber daya manusia yang belum terlalu mengerti tentang sistem akuntansi, sehingga akan mengakibatkan kendala dalam melaporkan laporan

keuangan. Serta masih terdapat beberapa perangkat desa yang belum paham komputer, bahkan ada yang belum bisa mengoperasikan komputer, yang akan berakibat lambatnya penyajian laporan keuangan. Fenomena kedua adalah belum terpasangnya jaringan internet di beberapa desa, dan tidak tersedianya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, sehingga peralatan yang sudah rusak atau telah usang seperti komputer tidak diperbaiki tepat pada waktunya. Fenomena ketiga adalah masih lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan, sehingga efektivitas sistem pengendalian internal daerah di beberapa desa belum optimal. Fenomena keempat yang berkaitan dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa adalah laporan keuangan tidak disajikan secara sistematis dan teratur. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa melalui variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal di kecamatan Tanggul kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah desa ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis :

Dapat memberikan wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan

pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan dasar acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

